

Dr. Wiratno, SH, MH

# HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH



PPSDT  
(Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percetakan Digital Trisakti)



PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA



Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian pemerintah nasional membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) UUD 1945 amandemen kedua, mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjut pengaturan pemerintahan daerah tersebut maka diterbitkan undang-undang pemerintahan daerah, baik yang mengatur pemerintahan daerah secara umum, maupun pemerintahan daerah khusus dan istimewa sebagai amanat dari Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945.

Dalam buku ini ada dua bagian pembahasan, yaitu Bagian Pertama membahas Pemerintahan Daerah Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta peraturan perubahannya dan Bagian Kedua membahas secara garis besar mengenai Pemerintahan Daerah Khusus dan Pemerintahan Daerah Istimewa yang diatur dalam peraturan tersendiri tentang kekhususan dan keistimewaannya masing-masing.

Buku Hukum Pemerintahan Daerah ini ditulis untuk kepentingan para mahasiswa fakultas hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanegara yang mengambil mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah sebagai referensi serta bagi masyarakat pada umumnya. Diharapkan dengan adanya buku Hukum Pemerintahan Daerah ini dapat memberikan manfaat terutama bagi aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu juga bagi masyarakat dapat memberikan manfaat bagaimana implementasi pelaksanaan pemerintahan daerah dijalankan, sehingga masyarakat merasakan adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.

ISBN 978-602-0750-09-5



9 786020 750095



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v	
Sambutan Dekan .....	vii	
<b>BAGIAN PERTAMA</b>		
<b>PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
BAB I	Pendahuluan .....	3
BAB II	Pengaturan Pemerintahan Daerah .....	7
BAB III	Pembagian Wilayah Negara .....	25
BAB IV	Kekuasaan Pemerintahan .....	27
BAB V	Urusan Pemerintahan .....	29
BAB VI	Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan .....	47
BAB VII	Penataan Daerah .....	51
BAB VIII	Penyelenggara Pemerintahan Daerah .....	75
BAB IX	Perangkat Daerah .....	173
BAB X	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .....	189
BAB XI	Pembangunan Daerah .....	205
BAB XII	Keuangan Daerah .....	217
BAB XIII	Badan Usaha Milik Daerah .....	253
BAB XIV	Pelayanan Publik .....	261
BAB XV	Partisipasi Masyarakat .....	269
BAB XVI	Perkotaan .....	271
BAB XVII	Kawasan Khusus Dan Kawasan Perbatasan Negara .....	275
BAB XVIII	Kerjasama Daerah dan Perselisihan .....	279
BAB XIX	Desa .....	285
BAB XX	Pembinaan dan Pengawasan .....	282
BAB XXI	Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah .....	297
BAB XXII	Inovasi Daerah .....	299
BAB XXIII	Informasi Pemerintahan Daerah .....	303
BAB XXIV	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah .....	307